



Migrasi Demi Sekolah: Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Negeri Kanike dalam Merespons Keterbatasan Akses Pendidikan Menengah di Pedalaman Seram Utara, Maluku

Christwyn Ruusniel Alfons¹, Jouverd Fendli Frans², Johanis Talaperuw³, Pieter Hendra Manuputty⁴
Universitas Pattimura
alfonschristwyn@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the partial relocation of the Kanike Indigenous community from the Manusela Mountains to coastal areas in North Seram District, Central Maluku Regency, due to limited secondary education access. The relocation focuses on Batu Pica and Rumah Lima, situated about two kilometres from Roho Village's centre. Utilising a qualitative case study approach, data were gathered through interviews, observations, and document analysis to explore the social, cultural, and structural factors influencing this decision. The findings reveal that the lack of secondary schools, inadequate transportation, and parental aspirations for children's social mobility through education primarily motivated the move. Relocation is seen as a collective adaptive strategy, leveraging Indigenous social capital, particularly kinship networks, to secure new land and manage resources. This shift has altered livelihoods, social interactions, and cultural practices, while posing challenges in ecological adaptation and identity negotiation. From a sociology of education perspective, the study underscores education's role in driving spatial and social transformation within Indigenous communities. It advocates for affirmative, context-sensitive education policies considering socio-cultural and geographical contexts in archipelagic regions. The study's novelty lies in education-driven relocation as an adaptive strategy and its impact on spatial and identity dynamics.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relokasi sebagian masyarakat adat Negeri Kanike dari permukiman pegunungan ke wilayah pesisir karena keterbatasan akses pendidikan menengah. Relokasi terkonsentrasi di Batu Pica dan Rumah Lima, sekitar dua km dari pusat Negeri Roho. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memahami dinamika sosial, kultural, dan struktural yang melatarbelakangi keputusan relokasi. Hasil menunjukkan bahwa relokasi dipicu oleh ketiadaan fasilitas SMP dan SMA di wilayah asal, keterbatasan transportasi, serta aspirasi orang tua untuk meningkatkan mobilitas sosial anak melalui pendidikan formal. Relokasi berlangsung sebagai strategi adaptasi kolektif yang bertumpu pada modal sosial komunitas adat, terutama jaringan kekerabatan dan legitimasi adat, sehingga memungkinkan akses lahan baru dan pengelolaan sumber daya secara gotong royong. Dampaknya meliputi perubahan pola mata pencaharian, interaksi sosial, dan praktik budaya, disertai tantangan adaptasi ekologis serta ketegangan identitas. Dari perspektif sosiologi pendidikan, temuan ini menegaskan bahwa akses pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga menjadi faktor penentu reorganisasi permukiman dan transformasi sosial. Penelitian merekomendasikan kebijakan pendidikan afirmatif yang kontekstual terhadap kondisi sosial-budaya dan geografis masyarakat adat. Kebaruan penelitian terletak pada relokasi kolektif berbasis pendidikan yang memanfaatkan modal sosial kekerabatan serta dampaknya pada reorganisasi spasial dan negosiasi identitas.

Informasi Artikel

Submission:
6 Mei 2026

Last revision:
6 Juni 2026

Acceptance:
11 Juni 2026

Publication:
28 Juni 2026

Keywords

Indigenous community, relocation, education, social capital, North Seram, Kanike Village, Batu Pica, Rumah Lima

Kata kunci

Masyarakat adat, Relokasi, Pendidikan, Modal Sosial, Seram Utara, Negeri Kanike, Batu Pica, Rumah Lima

PENDAHULUAN

Pendidikan kerap dipahami sebagai salah satu jalur utama mobilitas sosial vertikal, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara historis berada pada posisi marjinal dalam struktur sosial dan ekonomi (Bourdieu, 2018; Coleman, 1988). Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan manusia, namun efektivitasnya sering terhambat oleh perbedaan akses yang tajam antara wilayah maju dan daerah tertinggal. Namun demikian, akses terhadap pendidikan yang setara masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedalaman dan kepulauan dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ketimpangan spasial dalam penyediaan layanan pendidikan berkontribusi langsung terhadap rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan di wilayah terpencil (Hasanah, 2025; Malamassam, 2022). Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis-geografis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat adat yang seringkali menempatkan pendidikan bukan sebagai prioritas utama demi pemenuhan kebutuhan primer. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh distribusi guru yang tidak merata, lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, serta minimnya infrastruktur penunjang, sehingga pendidikan di wilayah-wilayah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan spasial (Triwiyanto & Kusumaningrum, 2025). Penelitian tentang keadilan spasial distribusi sekolah di Jakarta oleh Muhaimin et al. (2022) menunjukkan di wilayah perkotaan sekalipun, akses terhadap sekolah tidak merata, begitupun Bakari & Sidik (2025) menemukan pola ketimpangan akses SMA yang serupa di wilayah Bonebolango, menegaskan bahwa ketidakadilan spasial dalam pendidikan merupakan fenomena struktural nasional, bukan hanya terjadi di daerah terpencil seperti Seram Utara.

Dalam konteks keterbatasan struktural ini, sebagian masyarakat adat merespons melalui strategi adaptif berupa relokasi permukiman secara kolektif ke wilayah pesisir (Malamassam, 2022). Negeri Kanike memberikan gambaran empiris mengenai fenomena ini, di mana warga berpindah ke Batu Pica dan Rumah Lima demi akses pendidikan menengah anak-anak mereka. Relokasi tersebut merupakan bentuk agensi komunitas dalam menghadapi “zona buta” layanan publik yang berisiko menciptakan eksklusivitas sosial (Marbun et al., 2025). Proses pengambilan keputusan ini melibatkan otoritas adat dan jaringan kekerabatan yang berfungsi sebagai modal sosial dalam membuka akses lahan di wilayah tujuan (Coleman, 1988). Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma menjadi kekuatan bagi komunitas adat terpencil untuk mengatur kepentingan bersama dan bertahan hidup dalam keterisolasian.

Relokasi ini tidak dapat dipahami semata sebagai urbanisasi atau migrasi ekonomi, melainkan sebagai strategi sosial berbasis aspirasi pendidikan dan orientasi masa depan generasi muda (Malamassam, 2022). Proses pengambilan keputusan berlangsung secara kolektif dengan melibatkan otoritas adat dan jaringan kekerabatan yang berfungsi sebagai modal sosial dalam membuka akses lahan dan sumber daya di wilayah tujuan (Coleman, 1988). Dalam kerangka ini, pendidikan dimaknai bukan hanya sebagai kebutuhan individual, melainkan sebagai investasi sosial komunitas yang mendorong penataan ulang ruang hidup, relasi sosial, dan praktik kultural masyarakat adat.

Temuan penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan atas tiga hal mendasar. Pertama, relatif tidak seperti studi-studi sebelumnya yang umumnya menunjukkan keterkaitan relokasi penduduk berdasarkan tekanan ekonomi atau program pemerintah, namun temuan ini mengungkap bahwa akses terhadap pendidikan menengah dapat menjadi pemicu utama perpindahan permukiman secara kolektif pada komunitas adat. Kedua, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial kekerabatan dan legitimasi adat tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai mekanisme aktif untuk mengalihkan keterbatasan geografis menjadi peluang adaptif. Ketiga, dengan mengambil lokasi di Pegunungan Seram Utara, Maluku dimana wilayah yang sangat minim dalam peta literatur pendidikan Indonesia, studi ini memberikan sumbangan penting terhadap pendokumentasian dinamika pendidikan masyarakat adat di kawasan Indonesia timur.

Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis relokasi permukiman masyarakat adat Negeri Kanike sebagai strategi adaptif berbasis pendidikan, dengan menelaah faktor-faktor struktural dan kultural yang melatarbelakanginya serta peran modal sosial dan institusi adat dalam proses tersebut. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sosiologi pendidikan dengan menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai penggerak perubahan spasial dan penataan ulang kehidupan sosial pada tingkat komunitas adat (Coleman, 1988). Secara empiris, studi ini menghadirkan kasus dari Pegunungan Seram Utara, Maluku Tengah, wilayah yang relatif jarang diangkat dalam literatur pendidikan nasional dan menyediakan dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan afirmatif yang lebih sensitif terhadap konteks geografis, sosial, dan kultural masyarakat adat di wilayah kepulauan Indonesia (Husain et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus tunggal instrumental (Creswell & Poth, 2013). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses sosial, makna, dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan relokasi masyarakat adat dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Kasus yang dikaji adalah relokasi parsial masyarakat adat Negeri Kanike ke kawasan pesisir yang berlangsung secara intensif dalam satu dekade terakhir. Pemilihan kasus ini didasarkan pada keunikannya, yakni relokasi yang secara eksplisit didorong oleh kebutuhan akses pendidikan anak, bukan semata-mata akibat tekanan ekonomi atau kebijakan pembangunan negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 15 informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat Negeri Kanike, kepala keluarga yang telah berpindah ke wilayah pesisir, guru di SD Negeri 351 Kanike, serta aparat pemerintahan negeri. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses relokasi dan pengalaman empiris terkait akses pendidikan.

Kedua, observasi partisipasi (*participant observation*) dilakukan di dua lokasi utama, yaitu permukiman induk di wilayah pegunungan yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki selama sekitar empat hari dari arah Seram Utara, serta permukiman baru di kawasan pesisir yang relatif lebih mudah diakses. Observasi ini memungkinkan peneliti menangkap perubahan pola kehidupan, interaksi sosial, dan kondisi keseharian masyarakat sebelum dan sesudah relokasi.

Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti data monografi negeri, laporan Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, arsip komunitas adat, serta pemberitaan media terkait kondisi pendidikan di wilayah Seram Utara. Kombinasi ketiga teknik ini digunakan untuk mencapai triangulasi sumber data sekaligus memperkaya kedalaman dan konteks analisis kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (2014) yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan tematik untuk memudahkan pemahaman hubungan antar-kategori. Tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi simpulan (*conclusion drawing and verification*), yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka konseptual yang digunakan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui tiga strategi utama. Pertama, triangulasi sumber (*source triangulation*) dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan, tokoh adat, orang tua, guru, dan aparat negeri, serta dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi

kembali hasil interpretasi dan temuan sementara kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dan pemaknaannya. Ketiga, *peer debriefing* dilakukan melalui diskusi dengan peneliti lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, guna menguji konsistensi analisis dan meminimalkan bias subjektivitas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial-Ekologi dan Akses Pendidikan di Negeri Kanike

Negeri Kanike adalah komunitas adat di pedalaman pegunungan yang memiliki jaringan sosial lintas ruang yang kuat melalui hubungan genealogis (gandong). Sebagai komunitas adat terpencil, mereka menghadapi tantangan kompleks dalam pemenuhan hak dasar sebagai warga negara karena hambatan geografis yang ekstrem. Kondisi ini memaksa masyarakat melakukan reorganisasi ruang hidup demi keberlanjutan pendidikan generasi muda.

Namun, kekuatan sosial-kultural tersebut berada dalam ketegangan dengan kondisi geografis yang sangat membatasi akses terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan. Permukiman induk Kanike terletak jauh di pedalaman, dengan jarak tempuh sekitar dua sampai tiga hari perjalanan kaki dari pusat kecamatan, melintasi kawasan hutan Taman Nasional Manusela. Ketiadaan akses kendaraan bermotor menjadikan mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisik dan kondisi alam. Tingkat isolasi geografis ini secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan publik yang terpusat di wilayah pesisir, sekaligus mempersempit pilihan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

Dalam konteks keterbatasan tersebut, sebagian masyarakat Kanike merespons dengan membangun permukiman baru di kawasan pesisir, yaitu Batu Pica dan Rumah Lima. Batu Pica saat ini dihuni oleh lebih dari 14 kepala keluarga dengan jumlah rumah yang relatif sebanding, sementara Rumah Lima yang pada awalnya hanya terdiri dari lima rumah, hingga terus mengalami perkembangan seiring bertambahnya bangunan tempat tinggal baru. Pemilihan lokasi ini bersifat strategis, karena keduanya berdekatan dengan Negeri Roho di pesisir, dengan jarak sekitar dua kilometer, sehingga memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan dan layanan dasar lainnya. Relokasi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui pertimbangan kolektif yang mempertimbangkan jaringan kekerabatan, legitimasi adat, dan keberlanjutan hidup komunitas.

Kondisi pendidikan di permukiman asal memperlihatkan keterbatasan yang signifikan. Di wilayah pedalaman Kanike hanya tersedia satu Sekolah Dasar Negeri yang melayani kebutuhan pendidikan dasar anak-anak setempat, dengan dukungan infrastruktur yang sangat minim, termasuk keterbatasan akses listrik yang masih bergantung pada genset. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh ke wilayah pesisir atau ke ibu kota kecamatan. Situasi ini menempatkan keluarga pada dilema struktural, menghentikan pendidikan anak setelah tamat SD, menitipkan anak kepada kerabat di pesisir, atau melakukan relokasi keluarga secara menyeluruh.

Dengan demikian, relokasi permukiman yang dilakukan sebagian masyarakat Kanike tidak dapat dipahami sebagai sekadar respons terhadap faktor geografis semata, melainkan sebagai strategi sosial yang berkaitan erat dengan upaya mempertahankan keberlanjutan pendidikan generasi muda. Akses terhadap pendidikan menengah menjadi faktor penentu yang mendorong reorganisasi ruang hidup komunitas adat, sekaligus memperlihatkan bagaimana ketimpangan spasial layanan pendidikan dapat memicu perubahan sosial dan spasial yang mendalam di tingkat komunitas.

Kesenjangan Akses Pendidikan Menengah: Sebuah Batas Struktural

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa motif utama relokasi permukiman masyarakat adat Kanike ke wilayah pesisir berkaitan langsung dengan kebutuhan akan akses pendidikan lanjutan bagi

anak-anak. Seorang kepala keluarga yang juga berstatus sebagai *tua adat* dan kini bermukim di perkampungan pesisir Rumah Lima menuturkan: *“Kami di gunung hanya ada SD. Kalau tamat SD, tidak ada SMP di dekat situ. Anak-anak harus turun ke pantai kalau mau lanjut sekolah. Jadi kami bikin rumah di sini, di pesisir. Bukan karena tidak betah di gunung, tapi karena anak harus sekolah.”*

Pernyataan ini merefleksikan pengalaman kolektif banyak keluarga Kanike yang memaknai pendidikan formal sebagai jalan strategis untuk keluar dari keterisolasian geografis dan keterbatasan peluang ekonomi. Aspirasi orang tua terhadap mobilitas sosial anak melalui pendidikan tampak sangat kuat, bahkan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap struktur kehidupan keluarga. Temuan ini sejalan dengan Malamassam (2022) yang menunjukkan bahwa keluarga di wilayah pedalaman cenderung bersedia mengorbankan stabilitas ekonomi dan kenyamanan hidup jangka pendek demi investasi pendidikan jangka panjang bagi generasi berikutnya.

Secara empiris, data lapangan memperlihatkan bahwa anak-anak dari dua lokasi relokasi Batu Pica dan Rumah Lima pada tahap awal melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Dusun Malaku, masing-masing di SMP Negeri 8 Maluku Tengah dan SMA Negeri 36 Maluku Tengah. Selama masa sekolah tersebut, anak-anak umumnya harus tinggal bersama kerabat atau kenalan keluarga karena jarak yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang-pergi setiap hari. Pola ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya menuntut kesiapan anak, tetapi juga mengandalkan jaringan sosial keluarga yang mampu menyediakan tempat tinggal dan dukungan sehari-hari.

Namun, dinamika akses pendidikan mengalami perubahan penting sejak tahun 2025. Saat periode tersebut, anak-anak Negeri Kanike yang tinggal di Batu Pica dan Rumah Lima mulai melanjutkan pendidikan jenjang SMP di Negeri Roho, tepatnya di SMP Negeri 113 Maluku Tengah. Perubahan ini secara signifikan memperbaiki akses pendidikan, karena jarak dari permukiman relokasi ke sekolah hanya sekitar dua kilometer dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Kondisi ini mengurangi ketergantungan anak pada kerabat di luar rumah tangga inti dan memperkuat alasan relokasi sebagai strategi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan pendidikan.

Keputusan relokasi tersebut semakin dipertegas oleh sejumlah faktor struktural. Pertama, tidak tersedianya asrama pelajar yang dikelola secara berkelanjutan oleh pemerintah untuk menampung anak-anak dari wilayah pedalaman. Kedua, tingginya biaya hidup jika anak harus tinggal terpisah dari keluarga di pusat kecamatan, yang berada di luar kapasitas ekonomi rumah tangga petani subsisten. Ketiga, adanya risiko fisik yang nyata dalam perjalanan panjang melalui kawasan hutan, terutama pada musim hujan, yang memperbesar kerentanan anak-anak usia sekolah. Faktor-faktor ini menjadikan relokasi keluarga sebagai pilihan yang dianggap paling rasional dan aman.

Selain faktor pendorong tersebut, keberadaan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir juga berperan sebagai faktor penarik. Ketersediaan lembaga pendidikan dasar seperti PAUD Nusaweke dan SD Negeri 255 Maluku Tengah di Negeri Roho, meskipun belum secara langsung melayani jenjang menengah, dipersepsikan sebagai indikator kesiapan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dibandingkan wilayah pedalaman. Persepsi ini memperkuat keyakinan keluarga bahwa wilayah pesisir menawarkan prospek pendidikan yang lebih berkelanjutan bagi anak-anak mereka.

Dalam kerangka pilihan rasional Coleman (1988), keputusan relokasi ini tidak dapat dipahami semata sebagai kalkulasi untung-rugi individual, melainkan sebagai tindakan kolektif yang dimediasi oleh modal sosial komunitas adat. Jaringan kekerabatan antarmarga, hubungan *gandong* dengan negeri-negeri tetangga seperti Roho dan Saweli, serta legitimasi adat berfungsi sebagai sumber daya sosial yang memungkinkan distribusi informasi, akses lahan, dan gotong royong dalam pembangunan rumah. Modal sosial inilah yang memungkinkan terbentuknya dua permukiman baru, yaitu Batu Pica dengan 14 rumah dan Rumah Lima yang terus berkembang sebagai wujud konkret dari strategi kolektif masyarakat Kanike dalam merespons keterbatasan struktural akses pendidikan.

Dampak Relokasi pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya.

Perubahan Mata Pencarian dan Ekonomi Rumah Tangga

Relokasi ke wilayah pesisir membawa konsekuensi ekonomi yang tidak ringan bagi rumah tangga orang Kanike. Banyak keluarga yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten di pegunungan, khususnya komoditas bernilai tinggi seperti cengkih dan pala harus beradaptasi dengan kondisi ekologis pesisir yang kurang mendukung bagi jenis tanaman tersebut. Di wilayah baru, sebagian besar keluarga beralih profesi menjadi nelayan, buruh serabutan di perkebunan kelapa, atau pekerja informal di pelabuhan kecil. Peralihan ini menandai perubahan signifikan dalam struktur mata pencarian, dari ekonomi agraris berbasis lahan adat menuju ekonomi upahan yang lebih rentan terhadap ketidakpastian pasar. Penurunan produktivitas kebun dan keterbatasan lahan garapan di pesisir berdampak langsung pada meningkatnya ketergantungan rumah tangga terhadap bahan pangan dari luar. Kondisi ini membuat ekonomi keluarga menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan mempersempit ruang otonomi subsistensi yang sebelumnya relatif terjaga di wilayah pegunungan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, situasi ini dapat dibaca sebagai bentuk *trade-off* struktural, di mana keamanan ekonomi jangka pendek dikorbankan demi peluang mobilitas sosial jangka panjang melalui pendidikan anak. Menariknya, seluruh informan secara konsisten menilai pengorbanan ekonomi tersebut sebagai sesuatu yang layak (*worthwhile*). Pendidikan dipahami bukan sekadar sebagai kebutuhan individual anak, melainkan sebagai investasi kolektif keluarga dan komunitas untuk memutus mata rantai keterisolasian geografis dan keterbatasan sosial-ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keputusan relokasi tidak dapat direduksi sebagai pilihan ekonomi rasional semata, tetapi merupakan strategi reproduksi sosial, di mana keluarga secara sadar menegosiasikan kerentanan material demi akumulasi modal pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan posisi generasi berikutnya dalam struktur sosial yang lebih luas.

Transformasi Pola Interaksi dan Identitas Adat

Kehidupan di pesisir yang multikultural membawa nilai-nilai baru. Migrasi ini memberikan dampak ganda, di satu sisi memunculkan keragaman budaya dan peluang kerja, namun di sisi lain mengancam ruang budaya asli dan bahasa daerah (Muzaf & Putri, 2026). Meski demikian, masyarakat Kanike tetap mempertahankan identitas adatnya melalui praktik ritual seperti *sasi*. Sistem adat terbukti adaptif terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi komunitas (Izawahi et al., 2026).

Dalam banyak kasus, keluarga secara sengaja kembali ke wilayah pedalaman untuk sementara waktu guna mengikuti atau menyelenggarakan upacara adat. Pola mobilitas bolak-balik ini menunjukkan bahwa adat tidak ditinggalkan, melainkan dinegosiasikan ulang dalam konteks ruang hidup yang baru. Dengan demikian, relokasi menghasilkan proses negosiasi identitas yang dinamis. Identitas Kanike tidak direproduksi secara statis, tetapi dijaga melalui seleksi dan adaptasi unsur-unsur adat yang dianggap esensial. Elemen-elemen tersebut berfungsi sebagai “jangkar identitas” yang mempertahankan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan kesinambungan historis, khususnya bagi generasi muda yang tumbuh di lingkungan pesisir. Dalam konteks pendidikan, interaksi sehari-hari anak-anak Kanike dengan siswa dari latar belakang etnis lain di SMPN 113 Maluku Tengah berkontribusi pada pembentukan identitas hibrid di satu sisi terbuka terhadap pluralitas sosial, di sisi lain tetap terikat pada narasi asal-usul adat.

Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan dan relokasi spasial tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi dan akses layanan, tetapi juga menjadi arena penting bagi reproduksi dan transformasi identitas kultural. Alih-alih mengalami erosi budaya secara linear, masyarakat Kanike justru menunjukkan kapasitas reflektif untuk menegosiasikan modernitas pendidikan dengan keberlanjutan nilai-nilai adat, sebuah proses yang memperlihatkan ketahanan kultural dalam menghadapi perubahan struktural.

Capaian Pendidikan dan Harapan Mobilitas Sosial

Dampak paling nyata dari relokasi permukiman adalah peningkatan signifikan partisipasi pendidikan menengah di kalangan anak-anak Kanike. Sebelum relokasi, akses ke jenjang SMP dan SMA mengharuskan anak-anak menempuh perjalanan jauh menuju Maluku atau tinggal terpisah dari keluarga untuk bersekolah di SMPN 2 dan SMAN 36 Maluku Tengah. Kondisi tersebut membatasi partisipasi sekolah dan meningkatkan risiko putus sekolah. Pasca-relokasi, dengan keberadaan SMPN 113 Maluku Tengah di Negeri Roho, anak-anak dari Batu Pica dan Rumah Lima dapat menjangkau sekolah dengan berjalan kaki sekitar 2 km. Perubahan spasial ini berkontribusi pada lonjakan angka partisipasi kasar SMP, yang meningkat dari kisaran 10–15 persen sebelum relokasi menjadi lebih dari 80 persen dalam lima tahun terakhir. Bahkan, beberapa lulusan SMA telah berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di tingkat kabupaten dan provinsi.

Bagi orang tua dan elite adat, capaian pendidikan anak-anak tersebut dipahami sebagai akumulasi modal kultural sebagaimana dirumuskan oleh Bourdieu (1993). Pendidikan tidak semata dilihat sebagai sarana mobilitas sosial individual, melainkan sebagai investasi kolektif jangka panjang untuk memperkuat posisi tawar komunitas dalam relasi dengan negara dan institusi formal. Seorang tetua adat menyatakan bahwa generasi muda yang menguasai “bahasa laut dan darat” dipandang mampu berfungsi sebagai penghubung antara komunitas adat dan struktur pemerintahan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai sumber daya strategis yang memungkinkan artikulasi kepentingan komunitas secara lebih efektif di ruang birokrasi dan politik lokal.

Dengan demikian, relokasi berbasis pendidikan tidak hanya menghasilkan perbaikan akses layanan, tetapi juga membentuk horizon baru pemberdayaan komunitas adat. Pendidikan menjadi medium reproduksi sekaligus transformasi sosial, di mana modal kultural yang diperoleh generasi muda diharapkan dapat dikonversi menjadi modal simbolik dan institusional bagi komunitas secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat adat, pendidikan beroperasi sebagai mekanisme kolektif untuk menegosiasikan masa depan, bukan sekadar sebagai jalur mobilitas individual.

Tantangan Adaptasi Ekologis dan Psikososial

Relokasi ke wilayah pesisir tidak hanya menghadirkan keuntungan dalam hal akses pendidikan, tetapi juga memunculkan serangkaian tantangan sosial-ekologis dan psikososial yang sebelumnya tidak dialami di wilayah pegunungan. Kampung pesisir menghadapi persoalan lingkungan khas, seperti abrasi pantai serta keterbatasan ketersediaan air tawar pada musim kemarau. Sejumlah informan mengungkapkan kerinduan terhadap kesejukan udara pegunungan yang kini tergantikan oleh panas dan kelembapan pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa relokasi berbasis pendidikan mengandung *trade-off* ekologis yang harus ditanggung oleh mereka, sehingga keputusan pindah tidak pernah sepenuhnya bebas dari kerugian material dan kenyamanan hidup.

Di bidang pendidikan sendiri, meskipun relokasi telah secara signifikan memperbaiki akses ke jenjang SMP, kasus putus sekolah masih dijumpai, terutama pada jenjang SMA. Anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke SMAN 36 Maluku Tengah di Maluku masih harus tinggal terpisah dari orang tua dan menghadapi biaya hidup yang relatif tinggi di luar komunitas asal. Ketika orang tua gagal menopang kebutuhan tersebut secara berkelanjutan, pendidikan anak kembali berada dalam posisi rentan. Hal ini menegaskan bahwa akses spasial ke sekolah tidak serta-merta menjamin keberlanjutan pendidikan tanpa dukungan ekonomi dan institusional yang memadai.

Dari sisi psikososial, anak-anak Kanike yang menjadi bagian dari generasi pertama relokasi mengalami tantangan adaptasi yang tidak kecil. Tinggal dan bersekolah di lingkungan pesisir yang lebih heterogen secara sosial dan kultural memunculkan pengalaman gegar budaya ringan (*minor culture shock*). Beberapa

anak menghadapi stigma dari siswa lokal yang memandang mereka sebagai “orang gunung”. Stigma ini tidak selalu muncul dalam bentuk diskriminasi terbuka, tetapi cukup untuk mempengaruhi rasa percaya diri dan proses penyesuaian sosial di sekolah. Meskipun demikian, data lapangan menunjukkan bahwa seiring meningkatnya intensitas interaksi sehari-hari dan terbentuknya jejaring pertemanan lintas komunitas, proses integrasi sosial berlangsung secara gradual.

Temuan ini memperlihatkan bahwa relokasi berbasis pendidikan adalah proses sosial yang kompleks dan berlapis. Ia tidak hanya memindahkan penduduk dari satu ruang ke ruang lain, tetapi juga memindahkan anak-anak ke medan sosial baru yang menuntut kemampuan adaptasi kultural, emosional, dan simbolik. Dengan demikian, keberhasilan relokasi tidak dapat diukur semata dari peningkatan angka partisipasi sekolah, melainkan juga dari sejauh mana anak-anak dan keluarga mampu mengelola risiko ekologis, ekonomi, dan psikososial yang menyertainya. Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan bagi masyarakat adat perlu dilengkapi dengan dukungan sosial yang lebih komprehensif, terutama pada fase transisi antar ruang dan antar konteks budaya.

Analisis Perspektif Sosiologi Pendidikan: Antara Struktur dan Agensi

Kebaruan Teoritis: Antara Struktur dan Agensi dalam Konteks Masyarakat Adat

Realitas di Negeri Kanike memberikan gambaran teoretis penting tentang relasi antara struktur, ruang, dan akses pendidikan. Keberadaan letak geografis sarana pendidikan menengah yang menunjukkan relatif ketimpangan di Pulau Seram Utara yang terkonsentrasi cenderung di wilayah pesisir dibandingkan dengan wilayah pedalaman merupakan manifestasi dari ketidakadilan spasial (*spatial injustice*) yang dialami masyarakat adat. Walaupun di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu, namun realitas di Kanike membuktikan bahwa hak tersebut belum terimplementasikan secara inklusif bagi komunitas dengan tantangan geografis ekstrem.

Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada perluasan konsep *spatial injustice*, dimana selama ini lebih banyak diterapkan pada konteks perkotaan atau kawasan industri ke dalam ranah pendidikan masyarakat adat di pedalaman. Kanike justru menunjukkan agensi adaptif melalui relokasi kolektif, tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas adat. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan ruang juga bekerja melalui distribusi sekolah, dan dampaknya bukan hanya pada rendahnya partisipasi pendidikan, tetapi juga pada reorganisasi permukiman kolektif yang dipaksakan oleh keadaan.

Di sisi lain, respons masyarakat adat Kanike memperlihatkan agensi yang kuat. Tidak melalui sikap kepasrahan atau hanya menuntut kepada pemerintah, mereka memiliki inisiatif menggunakan sumber daya kolektif, baik modal sosial berbasis kekerabatan (*gandong*), hak ulayat yang fleksibel, serta pengetahuan lokal tentang kondisi alam sekitar wilayah mereka untuk merancang solusi adaptif. Penentuan pesisir sebagai tujuan bukan tanpa perhitungan rasional. Selain dekat dengan sekolah, wilayah pesisir juga menawarkan konektivitas ke pasar dan pusat administratif pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat adat bukan entitas statis yang selalu bertentangan dengan modernitas, melainkan aktor yang mampu melakukan rasionalitas kontekstual ketika pendidikan dianggap sebagai jalan menuju kesejahteraan generasi mendatang.

Konversi Modal Sosial Adat Menjadi Modal Kultural dan Simbolik dalam Perspektif Bourdieu.

Berkaitan dengan pendalaman terhadap analisis secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka Bourdieu tentang konversi antarmodal (*capital conversion*). Bourdieu (2018) membedakan empat bentuk modal, yaitu ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Realitas masyarakat adat Kanike, mengemukakan bahwa modal sosial adat berbasis jaringan *gandong*, legitimasi *tua adat*, serta praktik gotong royong dan *sasi* cenderung tidak hanya berfungsi sebagai perekat komunitas, tetapi juga sebagai sumber daya yang

secara aktif dikonversi untuk memperoleh akses ke pendidikan formal. Pendidikan formal sendiri merupakan salah satu bentuk akumulasi modal kultural institusional (ijazah, pengetahuan, disposisi akademik).

a. Konversi Modal Sosial menjadi Modal Kultural.

Konversi modal sosial menjadi modal kultural nampak terlihat melalui mekanisme jaringan kekerabatan memungkinkan keluarga-keluarga negeri Kanike memperoleh informasi tentang lokasi lahan garapan baru di pesisir, mendapat bantuan tenaga dalam pembangunan rumah, serta menjamin keamanan sosial selama masa transisi. Diketahui tanpa modal sosial yang kuat akan berpengaruh pada tingginya biaya relokasi yang relatif tidak dapat terjangkau oleh mereka. Oleh karena itu, terbangunnya permukiman di wilayah Batu Pica dan Rumah Lima sungguh bermanfaat bagi anak mereka bersekolah secara teratur di SMPN 113 Maluku Tengah. Selain itu, kehadiran mereka di sekolah lewat interaksi dengan guru dan teman sebaya dari latar belakang berbeda hingga memperoleh ijazah kelulusan ialah bentuk akumulasi modal kultural dalam wujud terlembagakan (*institutionalized cultural capital*). Kepemilikan ijazah SMP dan SMA, serta penguasaan bahasa Indonesia formal dan pengetahuan umum, akan menjadi poyensi mendasar yang dimiliki sehingga kelak dapat dikonversi menjadi peluang kerja atau akses ke pendidikan tinggi. Dengan demikian, modal sosial adat berfungsi sebagai “jembatan konversi” yang memungkinkan komunitas adat memasuki arena (*field*) pendidikan formal yang sebelumnya tertutup karena isolasi geografis. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fadillah et al. (2026) pada masyarakat adat Dayak Meratus, yang menunjukkan bahwa modal sosial dalam keluarga dan jaringan kekerabatan memainkan peran penting dalam membentuk lintasan akademik anak.

b. Konversi Modal Sosial menjadi Modal Simbolik.

Konversi modal sosial menjadi modal simbolik tampak dalam proses di mana keberhasilan relokasi dan capaian pendidikan anak-anak kemudian memperkuat legitimasi otoritas adat di mata komunitas dan bahkan pemerintah setempat. Ketika *tua adat* Kanike berhasil memfasilitasi warganya mengakses pendidikan tanpa menimbulkan konflik internal atau kehilangan identitas adat, posisinya sebagai pemimpin yang bijaksana semakin diakui. Pengakuan ini merupakan modal simbolik yaitu legitimasi, prestise, dan otoritas moral yang melekat pada individu atau institusi.

Lebih jauh, ketika lulusan SMA dari negeri Kanike kemudian berhasil menggapai cita-cita baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, tentu realitas ini menunjukkan mereka membawa serta reputasi kolektif komunitas Kanike sebagai “komunitas yang maju dalam pendidikan”. Reputasi ini adalah modal simbolik kolektif yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) komunitas dalam berhadapan dengan pemerintah, misalnya dalam mengajukan usulan pembangunan fasilitas umum atau pengakuan hak ulayat. Bahkan di mata guru dan kepala sekolah di SMPN 113 Maluku Tengah, anak-anak Kanike mulai dipandang sebagai “murid dari pedalaman yang gigih” menunjukkan sebuah bentuk pengakuan moral yang menjadi cikal bakal modal simbolik eksternal. Hal ini memperkuat temuan dari kajian tentang *Kai-Wait* sebagai modal sosial inklusif di Maluku (Makaruku et.al., 2024), tercermin bahwa nilai-nilai adat memiliki kemampuan membangun solidaritas lintas agama dan pengakuan sosial. Lebih lanjut, Litaay et al. (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai *Gandong* dan *Pela* di Maluku jika diintegrasikan ke dalam kurikulum akan terciptanya lingkungan sekolah yang toleran dan inklusif, yang juga mulai terlihat di SMPN 113 Maluku Tengah.

c. Risiko Konversi dan Negosiasi Habitus.

Konversi ini tidak hanya bersifat linear dan tanpa risiko. Bourdieu juga mengingatkan tentang kemungkinan tentang *hysteresis* ketidaksesuaian antara *habitus* lama dan medan baru. *Habitus* masyarakat Kanike yang terbentuk dari kehidupan agraris di pegunungan dengan menikmati waktu yang fleksibel, belajar dari alam, dan lain sebagainya berhadapan dengan kondisi awal tidak sepenuhnya cocok

dengan *arena* pendidikan formal di wilayah pesisir, dimana tuntutan kedisiplinan waktu, adanya jadwal yang mengatur, dan penggunaan bahasa Indonesia baku. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keluarga Kanike menunjukkan fleksibilitas habitus, melalui penyesuaian-penyesuaian dan adaptasi dengan lingkungan dan berbagai bentuk aturan-aturan sekolah.

Disamping itu, hal lainpun ditemui pada keberadaan anak-anak yang bersekolah di pesisir yaitu tantangan adaptasi psikososial lewat stigma-stigma yang terbangun terhadap mereka dengan sebutan “orang gunung”, begitupun potensi pengikisan terhadap bahasa daerah dan pengetahuan tentang alam. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi modal kultural melalui jalur pendidikan formal dapat mengancam reproduksi modal kultural tradisional. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keluarga Kanike secara aktif melakukan negosiasi melalui anak-anak tetap diajak kembali ke pedalaman saat upacara adat, penggunaan bahasa daerah masih digunakan dalam komunikasi internal keluarga, dan praktik *sasi* terus dijalankan secara periodik. Dengan demikian, masyarakat Kanike tidak sekadar mengkonversi modal sosial menjadi modal kultural dominan, tetapi juga berusaha mempertahankan modal kultural asli mereka sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap homogenisasi budaya. Temuan penelitian Fatharini et al. (2024) tentang “*Sekolah Adat Kewang*” di Maluku menunjukkan bahwa masyarakat adat di provinsi yang sama memiliki mekanisme sendiri untuk melestarikan pengetahuan lokal melalui institusi adat, sejalan dengan upaya masyarakat Kanike yang tetap mempraktikkan *sasi* dan ritual adat lainnya walaupun telah berelokasi.

d. Substitusi Modal Ekonomi oleh Modal Sosial.

Perlu dilihat bahwa dalam gambaran masyarakat Negeri Kanike, modal sosial berfungsi sebagai substitusi modal ekonomi. Bourdieu cenderung menganggap modal ekonomi sebagai basis utama konversi, namun masyarakat Kanike dengan keterbatasan ekonomi (petani subsisten) lebih mengandalkan gotong royong, sistem *sasi*, dan berbagi hasil kebun untuk membiayai relokasi dan kehidupan di wilayah pesisir. Lebih luas, pemetaan ketimpangan pendidikan di Indonesia oleh Robiati et al. (2025) menunjukkan bahwa daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Seram Utara dihadapkan dengan tantangan yang multidimensional, sehingga modal sosial akan menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif. Realitas ini memperkaya teori Bourdieu dengan menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat adat terpencil, modal sosial dapat menjadi *starting capital* yang memungkinkan akumulasi modal kultural, yang kemudian diharapkan dapat dikonversi menjadi modal ekonomi di masa depan (melalui pekerjaan yang lebih baik).

Implikasi Teoretis: Memperluas Cakupan Sosiologi Pendidikan.

Secara teoretis, elaborasi ini memperkaya perspektif Bourdieu dan Coleman yang selama ini lebih banyak diterapkan pada masyarakat perkotaan atau kelas sosial di Eropa. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat adat terpencil, modal sosial adat merupakan bentuk modal dominan yang mendahului dan memungkinkan akumulasi bentuk modal lainnya. Tanpa modal sosial yang kuat, akses terhadap pendidikan formal yang merupakan modal kultural bernilai tinggi di arena nasional tidak akan pernah tercapai. Realitas ini merespons temuan Bakari & Sidik (2025) yang menekankan perlunya analisis spasial dan sosiologis terhadap ketimpangan akses pendidikan menengah di daerah terpencil. Temuan ini sekaligus mengkritisi pandangan bahwa masyarakat adat selalu menjadi korban pasif dari ketimpangan struktural, sebaliknya mereka adalah agen yang secara sadar mengelola konversi modal untuk mencapai mobilitas antargenerasi.

Orang tua berharap anak-anak akan mengakumulasi modal kultural institusional (ijazah) dan modal sosial baru yang kelak dapat dimobilisasi kembali untuk kepentingan komunitas, misalnya menjadi perantara (*broker*) antara komunitas adat dengan birokrasi atau aktor ekonomi di luar. Implikasi jangka panjangnya adalah terbukanya kemungkinan “pribumisasi” struktur modern, di mana orang Kanike yang

terdidik secara formal tetap menjadi bagian dari komunitas adat mereka, namun dengan kapasitas advokasi dan negosiasi yang lebih besar.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi utama bagi pengembangan sosiologi pendidikan berbasis konteks masyarakat adat di wilayah kepulauan Indonesia, sekaligus memperluas cakupan teori Bourdieu ke dalam konteks geografis dan kultural yang sebelumnya relatif jarang tersentuh.

Implikasi Kebijakan

Temuan ini membawa implikasi kebijakan yang signifikan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan model sekolah menengah terintegrasi berasrama (*boarding school*) yang ditempatkan di kawasan strategis di pedalaman Seram Utara, sehingga anak-anak dari negeri-negeri pegunungan seperti Kanike dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus memaksa keluarga pindah secara permanen. Model ini sebaiknya dirancang bersama dengan masukan dari Tua Adat dan komunitas setempat untuk memastikan sensitivitas budaya.

Kedua, pemerintah perlu menyediakan subsidi transportasi dan beasiswa afirmatif bagi siswa dari komunitas adat terpencil yang bersekolah di luar wilayah asalnya. Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan formal, tetapi juga biaya hidup (*living cost*) selama menempuh pendidikan, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya hidup adalah salah satu pemicu utama putus sekolah di kalangan migran pendidikan.

Ketiga, dinas pendidikan kabupaten perlu melibatkan Tua Adat sebagai mitra perencana dalam setiap kebijakan pendidikan yang menyasar komunitas pegunungan. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Kanike, keputusan spasial besar seperti relokasi selalu melewati mekanisme kolektif yang dimediasi oleh otoritas adat. Keterlibatan Tua Adat akan meningkatkan legitimasi serta efektivitas program-program pendidikan di lapangan.

Keempat, perlunya percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Maluku Tengah yang telah didesak oleh warga adat Kanike dan negeri-negeri lain di Seram Utara. Perda ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas pendidikan yang berbasis budaya dan konteks lokal

SIMPULAN

Sebagai studi yang menghadirkan kebaruan empiris dan teoretis tentang relokasi berbasis pendidikan masyarakat adat di Indonesia timur, penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi sebagian masyarakat adat Negeri Kanike dari pedalaman pegunungan ke kawasan pesisir demi pendidikan lanjutan anak adalah fenomena multidimensi yang mencerminkan interaksi kompleks antara ketimpangan struktural, daya tahan kultural, dan agensi kolektif. Motif utama perpindahan terletak pada tidak tersedianya akses terhadap SMP dan SMA di wilayah asal, yang diperparah oleh infrastruktur transportasi yang nyaris tidak ada. Keputusan relokasi diambil secara kolektif dengan dukungan modal sosial yang kuat diperkuat oleh jaringan *gandong*, legitimasi adat dalam alokasi hak ulayat, serta inisiatif para ibu sebagai motor penggerak.

Dampak relokasi bersifat ambivalen. Di satu sisi, partisipasi pendidikan menengah meningkat drastis dan harapan mobilitas antargenerasi terbuka lebih lebar. Di sisi lain, muncul kerentanan ekonomi baru, erosi gradual bahasa daerah, dan beban adaptasi psikososial bagi anak-anak migran. Dari perspektif sosiologi pendidikan, pengalaman Kanike menegaskan bahwa akses terhadap lembaga pendidikan formal mampu menjadi katalisator reorganisasi spasial dan transformasi identitas komunitas adat, tanpa sepenuhnya memutus dimensi tradisional yang masih dijaga sebagai jangkar eksistensi.

Pengalaman Kanike sekaligus menjadi pengingat kritis bahwa kebijakan pendidikan yang seragam dan tidak memperhitungkan variabel geografi serta budaya lokal dapat secara tidak langsung memaksa terjadinya migrasi terselubung yang, walau menguntungkan secara edukatif, mengorbankan modal kultural jangka panjang masyarakat adat. Masa depan pendidikan di Seram Utara terletak pada kemampuan pemangku kebijakan untuk menghadirkan model pendidikan yang inklusif dan afirmatif, yang menjangkau hingga ke pelosok tanpa memaksa komunitas meninggalkan tanah leluhurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakari, A., & Sidik, F. (2025). Spatial inequality and accessibility of senior high school education in Bonebolango Regency. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2). <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7526>
- Bourdieu, P. (2018). The Forms of Capital. *The Sociology of Economic Life*, 78–92. <https://doi.org/10.4324/9780429494338-6>
- Bourdieu, Pierre. (1993). *The Field of Cultural Production*. Columbia University Press .
- Makaruku, N. D., Manuputty, F., Afdhal, A.. (2024). Kai-Wait sebagai pilar modal sosial yang inklusif di masyarakat adat Maluku. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03.5453>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Fadillah, H., Muharramah, N., Sari, A., Dwicahyo, M. N., & Sholeh, M. (2026). Social Marketing as a Strategic Mechanism for Strengthening Educational Social Capital in Indigenous Communities: Evidence from the Dayak Meratus of Indonesia. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 60–75. <https://doi.org/10.18592/MOE.V12I1.20063>
- Fatharini, A. T., Aini, A. N., & Anggraheni, P. (2024). From indigenous knowledge to human security: A case study of Sekolah Adat Kewang in Maluku, Indonesia. *Global-Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.22219/gli.v4i1.33796>
- Marbun, S.F., Sihombing, G. C., Simamora, A. M., Siregar, M.P, & Situmorang, B. (2025). Analisis Pemanfaatan Mangrove Terhadap Ekosistem Perairan Dan Bagi Masyarakat Sekitar Di Pantai Mangrove Paluh Getah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), 10049–10056. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5494>
- Hasanah, R. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil: Isu Ham Dan Kebijakan Hukum Di Indonesia. *Wicarana*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.57123/WICARANA.V3I1.97>
- Husain, S., Setijowati, A., & Puryanti, L. (2020). *Making Peace With Local Wisdom: Education For Indigenous People Of Tana Toa Kajang, Bulukumba, South Sulawesi*. <https://doi.org/10.4108/EAI.20-9-2019.2296856>
- Izawahi, I., Purnama, D. H., & Yunindyawati. (2026). The Role of Waiting For Tubang Who Migrates To Study Muara Tenang Village, Semende Darat Tengah District, Muara Enim Regency. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 15(2), 156–164. <https://doi.org/10.36526/SOSIOEDUKASI.V15I2.7837>

- Litaay S.Ch. H., Manuputty F. M. L., Afdhal A., & Makaruku N. D. (2025). Local culture-based education in the hidden curriculum: A strategy for fostering tolerance and peace in Maluku secondary schools. *Society*, 13(1). <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.777>
- Malamassam, M. A. (2022). Spatial Structure of Youth Migration in Indonesia: Does Education Matter? *Applied Spatial Analysis and Policy* 2022 15:4, 15(4), 1045–1074. <https://doi.org/10.1007/S12061-022-09434-6>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Muhaimin, A. A., Gamal, A., Setianto, M. A. S., & Larasati, W. L. (2022). The spatial justice of school distribution in Jakarta. *Heliyon*, 8(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11369>
- Muzaf, I., & Putri, D. F. (2026). Dampak Migrasi Terhadap Sosial Budaya di Kota Batam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1424–1433. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3257>
- Robiati, S., Hakim, A., Dharmawan, G., & Khotimah, C. (2025). Application of K-Medoids for regional classification based on quality, access, and governance of education in Indonesia. *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics*, 2025(1), 1002–1016. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2025i1.682>
- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. E. (2025). Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 188–214. <https://doi.org/10.52316/JAP.V21I2.607>